



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 550 TAHUN 2022

TENTANG

**PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI
PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH.
- KESATU : Menetapkan Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 550 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI
 TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

I.1.1. Kondisi Geografis dan Demografis Provinsi DKI Jakarta

Wilayah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 171 tahun 2007 tentang Penataan, Penetapan dan Luas Wilayah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah berupa daratan seluas 662,33 km² dan lautan seluas 7.660 km². Provinsi DKI Jakarta memiliki kurang lebih 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu dan 27 sungai/saluran/kanal yang digunakan sebagai sumber air minum, usaha perikanan, dan usaha perkotaan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Wilayah DKI Jakarta

Kepulauan Seribu	Pulau Pramuka	8,70	1,31%
Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	141,27	21,33%
Jakarta Timur	Cakung	188,03	28,39%
Jakarta Pusat	Menteng	48,13	7,27%
Jakarta Barat	Kembangan	129,54	19,56%
Jakarta Utara	Koja	146,66	22,14%
DKI Jakarta Kota	Jakarta Pusat	664,01	100%

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026

Jumlah penduduk DKI Jakarta berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim pada bulan Juni 2021 adalah sebesar 10.609.681 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0,57 persen. Kepadatan penduduk DKI Jakarta pada tahun 2021 adalah 15.978 jiwa setiap 1 km². Kota Jakarta Pusat memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 20.360 jiwa/km² sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Penduduk

Kepulauan Seribu	28.240	0,27%
Jakarta Selatan	2.233.855	21,05%
Jakarta Timur	3.056.300	28,81%
Jakarta Pusat	1.066.460	10,05%
Jakarta Barat	2.440.073	23,00%
Jakarta Utara	1.784.753	16,82%
DKI Jakarta Kota	10.609.681	100%

Sumber: BPS (diolah)

Sedangkan jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin berdasarkan survei interim pada bulan Juni 2021 adalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

0-4	409.299	389.749	799.048
5-9	409.708	391.131	800.839
10-14	416.558	396.706	813.264
15-19	425.852	408.996	834.848
20-24	432.874	421.508	854.382
25-29	435.503	423.712	859.215
30-34	445.591	437.712	883.303
35-39	440.327	433.312	873.639
40-44	431.464	425.462	856.926
45-49	396.281	391.664	787.945
50-54	342.251	338.140	680.391
55-59	280.483	280.101	560.584
60-64	208.315	213.962	422.277
65-69	146.948	155.082	302.030
70-74	74.773	85.558	160.331
75+	66.521	89.233	155.754
Total Penduduk	5.362.748	5.282.028	10.644.776

Sumber: BPS (diolah)

I.1.2. Potensi dan Kondisi Digitalisasi Daerah Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi elektronifikasi yang masih dapat dikembangkan untuk menciptakan penetrasi yang lebih dalam dan penerapan prinsip pembayaran nontunai: keamanan, efisiensi, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen. Adapun potensi dan strategi elektronifikasi dimaksud meliputi enam aspek yaitu:

1. Bantuan Sosial Non-Tunai;
2. Elektronifikasi Transaksi Pemda;
3. Elektronifikasi Destinasi Wisata Prioritas;
4. Elektronifikasi Transportasi Berbasis Rel;
5. Gerbang Pembayaran Nasional; dan
6. *Electronic Bill Invoicing, Presentment and Payment (EBIPP)*.

I.2. Perekonomian dan Fiskal Provinsi DKI Jakarta

I.2.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta

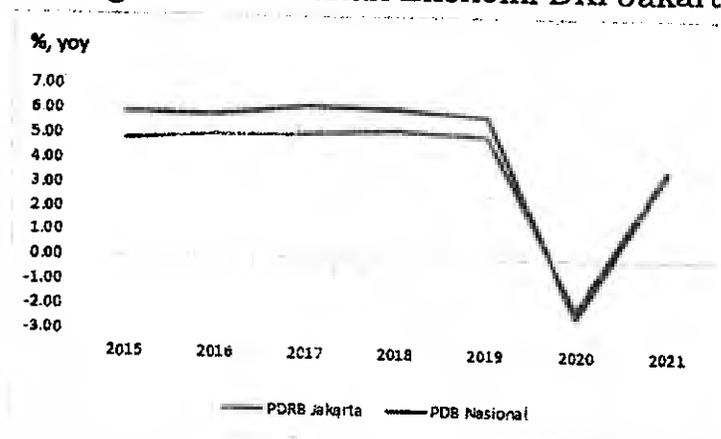
Perekonomian DKI Jakarta terus membaik dan tumbuh lebih tinggi pada Triwulan IV 2021 yang tercatat sebesar 3,64% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya (2,43%, yoy). Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan pelonggaran status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga level 1, serta ketika Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pada periode pelonggaran tersebut berbagai sektor ekonomi telah dibuka kembali dengan tingkat maksimum kapasitas pengunjung, namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tersebut ditopang oleh perbaikan seluruh komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan yang positif, kecuali konsumsi pemerintah yang berkontraksi. Sama seperti triwulan sebelumnya, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian DKI Jakarta pada triwulan IV dengan tumbuh sebesar 3,65% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Adapun kinerja pertumbuhan konsumsi rumah tangga tercatat positif sejalan dengan meningkatnya permintaan domestik seiring dengan optimisme masyarakat yang semakin tinggi di tengah kasus COVID-19 yang terkendali dan vaksinasi dosis 1 yang telah melampaui target DKI Jakarta.

Adapun komponen investasi menjadi kontributor kedua terbesar seiring dengan terus berjalannya Proyek Strategis Nasional (PSN) dan optimisme investasi korporasi yang meningkat. Pertumbuhan positif juga terjadi pada ekspor dan impor seiring dengan masih berlanjutnya permintaan domestik dan global. Sebaliknya, konsumsi pemerintah tercatat mengalami kontraksi pada triwulan IV. Kontraksi konsumsi pemerintah terutama berasal dari peningkatan pendapatan daerah yang menjadi faktor pengurang kinerja, di tengah adanya pertumbuhan realisasi belanja dari belanja K/L APBN dan APBD DKI Jakarta.

Secara keseluruhan tahun 2021, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tercatat tumbuh sebesar 3,56% (yoy), berbalik arah dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi (-2,39%, yoy). Dari sisi pengeluaran, perbaikan kinerja pertumbuhan terjadi pada seluruh komponen pengeluaran PDRB DKI Jakarta. Adapun komponen yang memberikan sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta adalah Konsumsi RT seiring dengan perbaikan aktivitas konsumsi masyarakat. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), seluruh LU utama memberikan sumbangan pertumbuhan yang positif, terutama LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, dan LU Informatika dan Komunikasi yang memberikan sumbangan terbesar terhadap perekonomian DKI Jakarta sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 1.

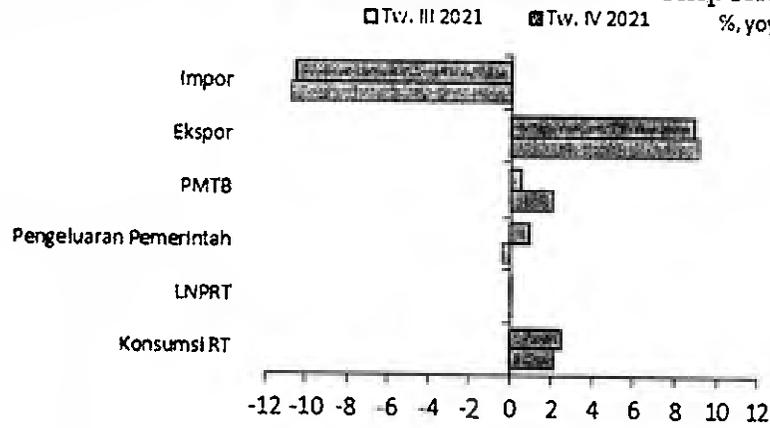
Grafik 1. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta dan Nasional



Sumber: BPS (diolah)

Kinerja pertumbuhan yang positif sejalan dengan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut dengan perekonomian nasional. Namun demikian, pertumbuhan DKI Jakarta pada tahun 2021 lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional (3,69%, yoy) sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 2.

Grafik 2. Kontribusi Pertumbuhan PDRB DKI Jakarta Komponen Pengeluaran



Sumber: BPS (diolah)

I.2.2. Perkembangan Penerimaan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 mengalami penurunan dari APBD murni, kendati masih lebih tinggi dibandingkan APBD-P tahun sebelumnya. Secara keseluruhan pada tahun 2021, realisasi pendapatan daerah dalam APBD DKI Jakarta pada triwulan IV tercatat tumbuh sebesar 34,13% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya maupun triwulan sama tahun sebelumnya, yakni masing-masing sebesar 1,49% (yoy) dan 30,26% (yoy) sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 3.

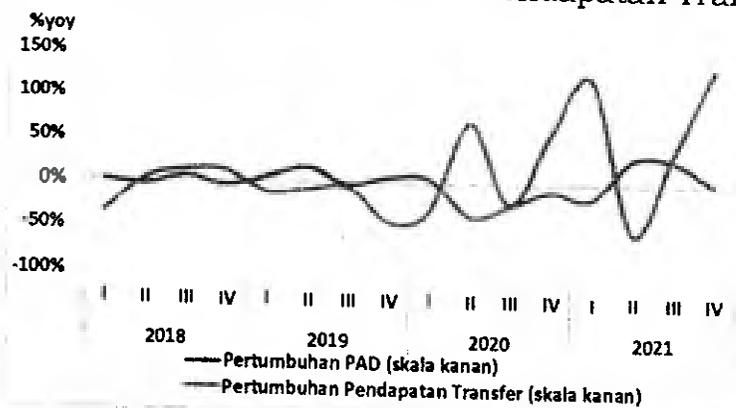
Grafik 3. Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah



Sumber: BPKD DKI Jakarta (diolah)

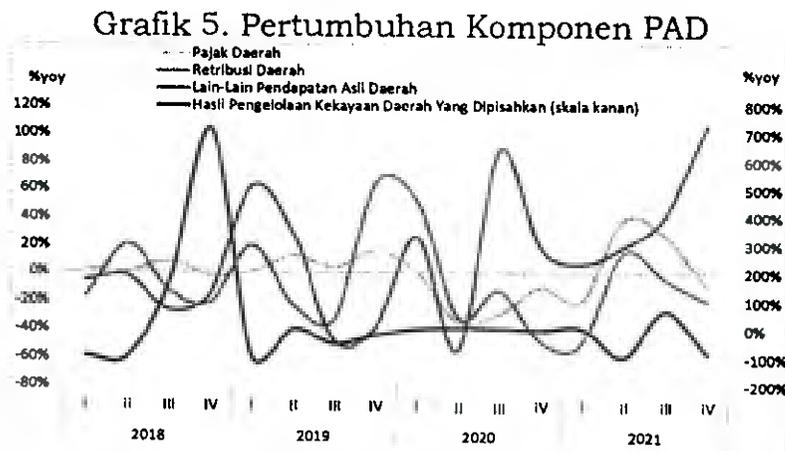
Peningkatan tersebut terutama didorong oleh realisasi Pendapatan Transfer yang tumbuh sebesar 133,22% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 32,95% (yoy), dengan pangasanya sebesar 45% terhadap total Pendapatan Daerah di triwulan laporan. Sementara itu, dengan pangsa sebesar 50%, komponen PAD tumbuh sebesar 2,84 (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya (28,43%, yoy) sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 4.

Grafik 4. Pertumbuhan PAD dan Pendapatan Transfer



Sumber: BPKD DKI Jakarta (diolah)

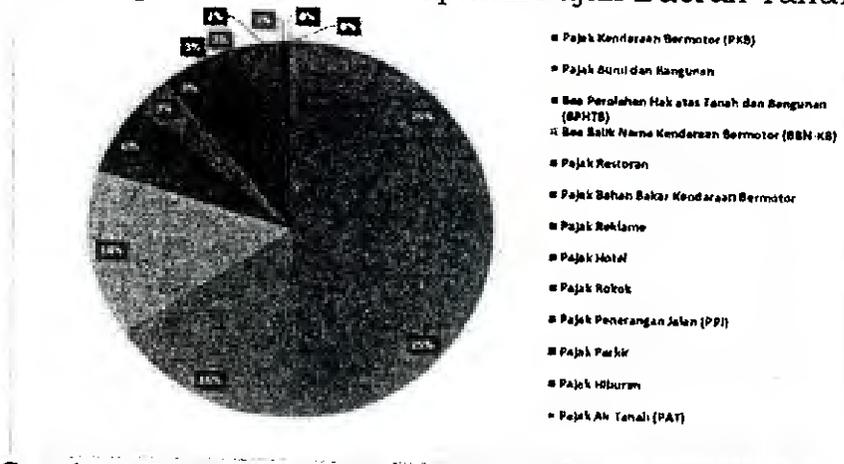
Pajak daerah merupakan komponen penerimaan terbesar di DKI Jakarta. Pertumbuhan kinerja PAD yang melambat pada triwulan IV 2021 salah satunya bersumber dari realisasi Pajak Daerah yang terkontraksi sebesar 9,44% (yoy).



Sumber: BPKD DKI Jakarta (diolah)

Penerimaan Pajak Daerah yang tercatat sebesar Rp8,6 triliun memiliki pangsa sebesar 75,9% terhadap total PAD. Lebih lanjut, komponen Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga terkontraksi pada triwulan laporan. Penurunan retribusi daerah salah satunya disebabkan oleh objek retribusi yang dijadikan lokasi isolasi penanganan COVID-19, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 675 Tahun 2021 yang kemudian diganti dengan Keputusan Gubernur Nomor 762 Tahun 2021 serta penurunan retribusi wisata maupun jasa usaha seiring dengan masih diterapkannya pembatasan aktivitas untuk pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. Sebaliknya, realisasi Lain-lain PAD tercatat tumbuh sebesar 105,59% (yoy) pada triwulan laporan, didorong oleh realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 6.

Grafik 6. Pangsa Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021



Sumber: BPKD DKI Jakarta (diolah)

I.2.3. Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Mendorong Perekonomian dan Fiskal

Secara keseluruhan tahun 2021, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tercatat tumbuh sebesar 3,56% (yoy), berbalik arah dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi (-2,39%, yoy). Kinerja pertumbuhan yang positif sejalan dengan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut sejalan dengan perekonomian nasional. Namun demikian, pertumbuhan DKI Jakarta pada tahun 2021 lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional (3,69%, yoy).

Pertumbuhan ekonomi didukung oleh pengendalian COVID-19 di Wilayah DKI Jakarta, kebijakan Pemerintah di Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong perekonomian dan fiskal daerah khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. Dalam Pergub tersebut diatur terkait penanganan COVID-19 dan pada Bab X pasal 47 disebutkan upaya pemulihan ekonomi yang mencakup pemberian insentif fiskal dan non fiskal.

II. KENDALA DAN PERMASALAHAN

Peta permasalahan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) diperoleh dari proses identifikasi dan analisis hambatan atau kendala pelaksanaan ETPD berdasarkan kanal pembayaran dan jenis pendapatan daerah dan belanja daerah. Permasalahan pelaksanaan ETPD di Provinsi DKI Jakarta dibagi menjadi 4 (empat) faktor masalah berdasarkan penyebabnya yaitu permasalahan dari pemerintah daerah, masyarakat, bank, dan infrastruktur.

II.1. Kendala dan Permasalahan Berdasarkan Kanal Pembayaran

Kendala dan permasalahan pelaksanaan ETPD berdasarkan kanal pembayaran dapat dilihat secara rinci pada Tabel 4. Permasalahan dari sisi eksternal adalah belum tersedianya *single platform* sehingga pengembangan harus dilakukan untuk setiap bank dan ketersediaan regulasi, baik pada tingkat pusat maupun daerah, yang mewajibkan pembayaran secara elektronik. Pada sisi masyarakat, permasalahan utama terletak pada literasi masyarakat terkait cara pembayaran pajak dan retribusi secara elektronik serta literasi teknologi, khususnya terkait layanan pembayaran digital, baik yang disediakan oleh perbankan maupun penyedia jasa pembayaran. Sementara itu, permasalahan teknis dari pihak bank adalah terlambatnya pelimpahan penerimaan ke RKUD dan tidak optimalnya pelayanan keluhan pelanggan yang dilakukan oleh *call center*. Sedangkan kendala infrastruktur yang sering terjadi adalah gangguan pada sisi *biller* dan *bank*.

Tabel 4. Kendala dan Permasalahan Berdasarkan Kanal Pembayaran

Jenis Kanal	Faktor Masalah			
	Pemda	Masyarakat	Bank	Infrastruktur
Teller/Kantor POS	Tidak ada	Antrian panjang	Pelimpahan H+0	Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank
ATM	Belum adanya <i>single platform</i> pembayaran sehingga harus mengembangkan untuk tiap bank	Belum banyak yang mengetahui tentang pembayaran melalui ATM	Pelimpahan H+0	Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank
Internet/Mobile banking	Belum adanya <i>single platform</i> pembayaran sehingga harus mengembangkan untuk tiap bank	1. Belum banyak yang mengetahui tentang pembayaran melalui Internet/Mobile Banking 2. Internet Banking <i>corporate</i> berbeda dengan <i>retail</i>	Pelimpahan H+0	Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank

Jenis Kanal*	Faktor Masalah			
	Pemda	Masyarakat	Bank	Infrastruktur
E-Commerce	Belum ada peraturan yang mewajibkan pembayaran secara elektronik	Belum banyak yang mengetahui tentang pembayaran melalui e-Commerce	Pelimpahan H+0	Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank
Retail	Tidak ada	Antrian panjang	Pelimpahan H+0	Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank
QRIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada peraturan yang mewajibkan pembayaran secara elektronik 2. Limitasi pembayaran melalui QRIS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sering terkendala pada saat pembayaran 2. Masih ada masyarakat yang belum memiliki <i>e-wallet</i> atau pun <i>mobile banking</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelimpahan H+0 2. Call Center Bank DKI selaku Agregator belum dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat atas dana yang di refund ketika terjadi kegagalan saat pembayaran via QRIS 	Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank

II.2. Kendala dan Permasalahan Berdasarkan Jenis Penerimaan

Kendala dan permasalahan berdasarkan jenis penerimaan dapat dilihat secara rinci pada Tabel 5. Secara umum, ketersediaan kanal pembayaran pajak daerah lebih banyak dibandingkan kanal pembayaran retribusi daerah. Sampai dengan akhir tahun 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah bekerja sama dengan 15 Bank, PT Pos Indonesia, 4 (empat) Penyedia Jasa Pembayaran (OVO, GOPAY, LinkAja, dan DANA), 4 (empat) *marketplace/e-commerce* (Tokopedia, Bulakapak, Blili, dan Traveloka), serta 3 (tiga) retail (Indomaret, Alfamart, dan Dan-Dan).

Kendala dan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penerimaan pajak daerah di antaranya adalah tidak lengkapnya data wajib pajak, belum optimalnya sistem, keterbatasan regulasi, dan permasalahan terkait pengawasan. Sementara pada sisi masyarakat, permasalahannya adalah belum seluruh masyarakat mengetahui layanan pembayaran digital yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.

Sementara itu, kendala terkait bank kesulitan dalam perluasan kanal pembayaran karena menggunakan agregator Bank DKI dan belum optimalnya penanganan keluhan masyarakat. Sedangkan, masalah infrastruktur yang dihadapi adalah belum terintegrasinya sistem pajak dan retribusi dengan sistem milik SKPD terkait, gangguan baik dari sisi *biller* maupun bank, dan ketersediaan infrastruktur di Kepulauan Seribu.

Tabel 5. Kendala dan Permasalahan Berdasarkan Jenis Penerimaan

Jenis Penerimaan	Faktor Masalah			
	Pemda	Masyarakat	Bank	Infrastruktur
PKB	Data alamat WP banyak yang kurang jelas	Belum banyak yang mengetahui SIGNAL	Belum ada kerjasama dengan e-commerce	Belum ada kerjasama dengan e-commerce
PBBKB	Belum ada <i>online system</i>	Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik		Tidak ada

Jenis Penerimaan	Faktor Masalah			
	Pemda	Masyarakat	Bank	Infrastruktur
BBNKB	Belum ada peraturan yang mendukung pelayanan BBNKB secara <i>online</i>	Pelayanan belum dapat dilakukan secara <i>online</i>	Belum ada kerjasama dengan e-commerce	Belum ada kerjasama dengan e-commerce
Pajak Rokok	Tidak ada	Tidak ada		Tidak ada
Pajak Hotel	<i>Online system</i> belum optimal	Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik		Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank
Pajak Restoran	<i>Online system</i> belum optimal	Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik		Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank
Pajak Hiburan	<i>Online system</i> belum optimal	Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik		Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank
Pajak Reklame	Sulit mengawasi penayangan reklame	Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik		Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank
Pajak Penerangan Jalan	Belum ada <i>online system</i>	Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik		Tidak ada
Pajak Air Tanah	Belum ada <i>online system</i>	Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik		Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank
Pajak Parkir	<i>Online system</i> belum optimal	Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik		Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank
BPHTB	Sulit mengawasi transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan	Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik		Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank
PBB-P2	Penghapusan piutang dan penagihan aktif belum optimal	Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik		Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1. Kanal pembayaran belum sebanyak pembayaran pajak. 2. Cara perhitungan volume sampah dilakukan di akhir yang seharusnya dilakukan di awal sebelum jasa layanan diberikan	1. Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik 2. Masyarakat menginginkan pembayaran yang mudah dan murah 3. Pembayaran hanya terbatas oleh Bank DKI	Perluasan kanal pembayaran sulit dilakukan karena menggunakan agregator Bank DKI sehingga ada perjanjian bisnis	Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank
Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	1. Kanal pembayaran belum sebanyak pembayaran pajak 2. Keterlambatan dalam penerbitan SKRD sehingga WR merasa tidak perlu membayar	Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik	Perluasan kanal pembayaran sulit dilakukan karena menggunakan agregator Bank DKI sehingga ada perjanjian bisnis	1. Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank 2. Belum terintegrasinya sistem Dinas Pertamanan Hutan Kota dengan sistem DPMPSTP

Jenis Penerimaan	Faktor Masalah			
	Pemda	Masyarakat	Bank	Infrastruktur
Retribusi Los	Kanal pembayaran belum sebanyak pembayaran pajak	Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik	Perluasan kanal pembayaran sulit dilakukan karena menggunakan agregator Bank DKI sehingga ada perjanjian bisnis	Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank
Retribusi Kios	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kanal pembayaran belum sebanyak pembayaran pajak 2. WR yang berjumlah 13.000 tidak dapat mengecek sendiri tagihan bulannya, sedangkan penerbit SKRD adalah Kasatpel PPKUKM Kecamatan yang jumlahnya tidak sampai 40 orang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik 2. WR yang berada pada lokasi sementara dan lokasi binaan merasa kecewa karena belum ada perbaikan lokasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan kanal pembayaran sulit dilakukan karena menggunakan agregator Bank DKI sehingga ada perjanjian bisnis 2. Pembayaran melalui Tokopedia dan Go-Bills sering terkendala/gagal proses 3. Perlu kerja sama agar rekening yang telah tertutup dapat dibuka kembali dengan mudah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank 2. Koreksi CMS sangat lama dalam proses pemutakhiran 3. Pada CMS, retribusi yang telah dibayarkan tertagih kembali
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Kanal pembayaran belum sebanyak pembayaran pajak	Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan kanal pembayaran sulit dilakukan karena menggunakan agregator Bank DKI sehingga ada perjanjian bisnis 2. Pembayaran melalui <i>mobile banking</i> sering terkendala dan WR harus menunggu 2-3 jam untuk masuk kembali ke <i>mobile banking</i> 3. Mesin EDC error 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank 2. Pemberitahuan terkait pemeliharaan sistem mendadak sehingga waktu untuk menyampaikan kepada masyarakat sangat terbatas
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	Kanal pembayaran belum sebanyak pembayaran pajak	Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik	Perluasan kanal pembayaran sulit dilakukan karena menggunakan agregator Bank DKI sehingga ada perjanjian bisnis	Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa	Kanal pembayaran belum sebanyak pembayaran pajak	Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik	Perluasan kanal pembayaran sulit dilakukan karena menggunakan agregator Bank DKI sehingga ada perjanjian bisnis	Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank
Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)	Kanal pembayaran belum sebanyak pembayaran pajak	Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik	Perluasan kanal pembayaran sulit dilakukan karena menggunakan agregator Bank DKI sehingga ada perjanjian bisnis	Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kanal pembayaran belum sebanyak pembayaran pajak 2. SKRD ditetapkan secara masal/kolektif sehingga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik 2. Kartu Jakcard tidak dapat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan kanal pembayaran sulit dilakukan karena menggunakan agregator Bank DKI sehingga ada perjanjian bisnis 	Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank

Jenis Penerimaan	Faktor Masalah			
	Pemda	Masyarakat	Bank	Infrastruktur
	menjadi temuan BPK 3. WR hanya mendapat kuitansi yang nilai transaksinya relatif kecil	diuangkan mengingat Wajib Retribusi yang datang ke museum bukan hanya warga DKI 3. Kesulitan dalam memperoleh NIK	2. Penanganan keluhan oleh <i>call center</i> Bank DKI atas permasalahan kartu Jakcard masih cukup lambat 3. Kartu Jakcard seharusnya dapat seperti kartu di <i>food station</i>	
Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis	Kanal pembayaran belum sebanyak pembayaran pajak	Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik	Perluasan kanal pembayaran sulit dilakukan karena menggunakan agregator Bank DKI sehingga ada perjanjian bisnis	Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Kanal pembayaran belum sebanyak pembayaran pajak	Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik	Perluasan kanal pembayaran sulit dilakukan karena menggunakan agregator Bank DKI sehingga ada perjanjian bisnis	Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank
Retribusi Penyewaan Tanah	Kanal pembayaran belum sebanyak pembayaran pajak	Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik	Perluasan kanal pembayaran sulit dilakukan karena menggunakan agregator Bank DKI sehingga ada perjanjian bisnis	Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank
Retribusi Penyewaan Bangunan	Kanal pembayaran belum sebanyak pembayaran pajak	Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik	Perluasan kanal pembayaran sulit dilakukan karena menggunakan agregator Bank DKI sehingga ada perjanjian bisnis	Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank
Retribusi Pemakaian Laboratorium	Kanal pembayaran belum sebanyak pembayaran pajak	Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik	1. Perluasan kanal pembayaran sulit dilakukan karena menggunakan agregator Bank DKI sehingga ada perjanjian bisnis 2. Teller Bank DKI tutup lebih cepat	Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank
Retribusi Pemakaian Ruangan	Kanal pembayaran belum sebanyak pembayaran pajak	Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik	1. Perluasan kanal pembayaran sulit dilakukan karena menggunakan agregator Bank DKI sehingga ada perjanjian bisnis 2. Pembayaran melalui Tokopedia dan Go-Bills sering terjadi kendala/ <i>error</i>	Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	Kanal pembayaran belum sebanyak pembayaran pajak	1. Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik 2. Masih banyak protes masyarakat saat terjadi pelanggaran atas parkir	1. Perluasan kanal pembayaran sulit dilakukan karena menggunakan agregator Bank DKI sehingga ada perjanjian bisnis 2. Pembayaran melalui QRIS/ Tokopedia/OVO/ DANA/GoBills sering terkendala. Dalam hal saat terjadi	1. Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank 2. Ketergantungan terhadap jaringan internet yang tinggi karena penginputan tagihan harus melalui sistem

Jenis Penerimaan	Faktor Masalah			
	Pemda	Masyarakat	Bank	Infrastruktur
		tidak pada tempatnya yang berakibat kendaraan pribadi mereka diderek.	pembayaran, tervalidasi di bank DKI membutuhkan waktu lama (15-30 menit), tidak secara <i>real time</i> langsung tervalidasi di Bank DKI. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran terjadi gagal bayar karena <i>response time</i> yang lama.	retribusi. Terkadang internet <i>error</i> sehingga sulit untuk membuat tagihan
Retribusi Pemakaian Alat	Kanal pembayaran belum sebanyak pembayaran pajak	Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik	Perluasan kanal pembayaran sulit dilakukan karena menggunakan agregator Bank DKI sehingga ada perjanjian bisnis	Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	Kanal pembayaran belum sebanyak pembayaran pajak	Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik	Perluasan kanal pembayaran sulit dilakukan karena menggunakan agregator Bank DKI sehingga ada perjanjian bisnis	Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	Kanal pembayaran belum sebanyak pembayaran pajak	Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik	Perluasan kanal pembayaran sulit dilakukan karena menggunakan agregator Bank DKI sehingga ada perjanjian bisnis	Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	Kanal pembayaran belum sebanyak pembayaran pajak	Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik	Perluasan kanal pembayaran sulit dilakukan karena menggunakan agregator Bank DKI sehingga ada perjanjian bisnis	Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Kanal pembayaran belum sebanyak pembayaran pajak	Mayoritas wajib retribusi yang mendapatkan pelayanan adalah penduduk lokal yang belum familiar dengan pembayaran <i>cashless</i> sehingga masih membayar dengan uang tunai	1. Cabang/ATM Bank DKI di pulau sangat minim sehingga kesulitan dalam penyetoran uang tunai di pulau 2. Dimungkinkan untuk melakukan pembayaran dengan <i>Jakone mobile</i> , namun membutuhkan jaringan internet yang kuat karena di pulau sering terjadi <i>error</i> untuk membuka <i>Jakone mobile</i> .	1. Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank 2. Sarana dan prasarana internet di Kepulauan Seribu kurang memadai
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1. Kanal pembayaran belum sebanyak pembayaran pajak 2. Kartu Jakcard bukan solusi terbaik untuk digitalisasi pembayaran	1. Sering terjadi perdebatan antara pengunjung dengan petugas tiket karena yang tertulis harga tiket dibawah harga beli Jakcard	1. Perluasan kanal pembayaran sulit dilakukan karena menggunakan agregator Bank DKI sehingga ada perjanjian bisnis 2. Top-Up saldo kelipatan Rp5.000 sedangkan yang dibutuhkan bisa kurang dari	Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank

Jenis Penerimaan	Faktor Masalah			
	Pemda	Masyarakat	Bank	Infrastruktur
Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapergub Sistem Manajemen Tiket belum ada perkembangan lebih lanjut 2. Kanal pembayaran belum sebanyak pembayaran pajak 3. Penetapan SKRD dilakukan secara masal karena tiket masih dilakukan secara manual 4. Ketergantungan yang besar akan kondisi cuaca di laut yang bisa menghambat kegiatan penyeberangan antar pulau di Kepulauan Seribu 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ditemukan beberapa Jakcard yang sudah tidak digunakan pengunjung pada tempat sampah yang masih ada saldo <p>Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik</p>	<p>jumlah kelipatannya</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Jakcard rusak tidak dapat di-tapping 4. Pembelian Jakcard secara tunai dan tidak berlaku untuk kartu bank lain 5. Peralatan yang diberikan oleh Bank DKI ketika rusak maka harus menunggu lama untuk penanganannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank 2. Jaringan di pulau belum stabil
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kanal pembayaran belum sebanyak pembayaran pajak 2. Penetapan SKRD dilakukan secara masal karena objeknya adalah jual beli 	<p>Sering kali ketika pembelian dalam jumlah kecil (contoh: satu tanaman dengan harga 10rb), pembeli sungkan untuk memberikan KTP dan membayar ke ATM atau <i>mobile banking</i> karena nominal yang kecil</p> <p>Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik</p>	<p>Perluasan kanal pembayaran sulit dilakukan karena menggunakan agregator Bank DKI sehingga ada perjanjian bisnis</p>	<p>Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank</p>
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kanal pembayaran belum sebanyak pembayaran pajak 2. Penetapan SKRD dilakukan secara masal karena 	<p>Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan kanal pembayaran sulit dilakukan karena menggunakan agregator Bank DKI sehingga ada perjanjian bisnis 2. Pembayaran melalui e-commerce yang tidak bisa masuk ke rekening Bank 	<p>Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank</p>

Jenis Penerimaan	Masalah			
	Pemda	Masyarakat	Bank	Infrastruktur
	objeknya adalah jual beli		DKI sedangkan saldo dalam akun <i>e-commerce</i> sudah terpotong sehingga harus membayar ulang (dua kali pembayaran)	
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	1. Kanal pembayaran belum sebanyak pembayaran pajak 2. Penetapan SKRD dilakukan secara masal karena objeknya adalah jual beli	Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik	Perluasan kanal pembayaran sulit dilakukan karena menggunakan agregator Bank DKI sehingga ada perjanjian bisnis	Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Kanal pembayaran belum sebanyak pembayaran pajak	Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik	Perluasan kanal pembayaran sulit dilakukan karena menggunakan agregator Bank DKI sehingga ada perjanjian bisnis	Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank
Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Kanal pembayaran belum sebanyak pembayaran pajak	Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik	Perluasan kanal pembayaran sulit dilakukan karena menggunakan agregator Bank DKI sehingga ada perjanjian bisnis	Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Kanal pembayaran belum sebanyak pembayaran pajak	Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik	Perluasan kanal pembayaran sulit dilakukan karena menggunakan agregator Bank DKI sehingga ada perjanjian bisnis	Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank
Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	Kanal pembayaran belum sebanyak pembayaran pajak	Belum banyak yang mengetahui pembayaran secara elektronik	Perluasan kanal pembayaran sulit dilakukan karena menggunakan agregator Bank DKI sehingga ada perjanjian bisnis	Gangguan jaringan baik di sisi <i>biller</i> maupun di bank

III. DIGITALISASI DI PROVINSI DKI JAKARTA

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital.

Tujuan dilaksanakannya ETPD adalah untuk meningkatkan transparansi pemerintah daerah sehingga mengurangi kebocoran pada sisi pendapatan daerah, meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada sisi belanja daerah.

Berdasarkan hasil penilaian Bank Indonesia untuk kategori provinsi, Indeks ETPD Provinsi DKI Jakarta berada pada posisi kedua dengan capaian 94,8%. Hal menjadikan Provinsi DKI Jakarta berada pada kategori provinsi digital.

Gambar 1. Hasil Penilaian Indeks ETPD

PROVINSI			KOTA			KABUPATEN		
No	TOP 20	BOTTOM 20	No	TOP 20	BOTTOM 20	No	TOP 20	BOTTOM 20
1	Prov. DIY 98,4%	Prov. Maluku 32,2%	1	Kota Yogyakarta 99,2%	Kota Sorong 21,1%	1	Kab. Karangasem 98,7%	Kab. Lembeh Jaya 1,0%
2	Prov. DKI Jakarta 94,6%	Prov. Jambi 34,6%	2	Kota Palembang 96,3%	Kota Tulungagung 23,6%	2	Kab. Karangasem 96,4%	Kab. Sorong Selatan 2,3%
3	Prov. Kalimantan Timur 92,8%	Prov. Kalimantan Tengah 60,7%	3	Kota Surakarta 96,3%	Kota Ambon 34,7%	3	Kab. Siroman 96,0%	Kab. Buntok Selatan 3,1%
4	Prov. Jawa Timur 92,3%	Prov. Papua 61,0%	4	Kota Denpasar 94,5%	Kota Subulussalam 36,2%	4	Kab. Sidoarjo 95,4%	Kab. Kepulauan Aru 5,9%
5	Prov. Sulawesi Selatan 91,6%	Prov. Sulawesi Tenggara 63,0%	5	Kota Pangkal Pinang 90,7%	Kota Sabang 38,4%	5	Kab. Banyuwangi 95,4%	Kab. Sorong Bagian Timur 6,8%
6	Prov. Jawa Barat 90,3%	Prov. Nusa Tenggara Timur 63,2%	6	Kota Solo 93,3%	Kota Tidore Kepulauan 40,6%	6	Kab. Majene 95,3%	Kab. Bera Selatan 10,9%
7	Prov. Kalimantan Utara 89,2%	Prov. Kalimantan Selatan 62,4%	7	Kota Samarinda 93,1%	Kota Sungai Penuh 43,8%	7	Kab. Bandung 94,6%	Kab. Pongkorong Ardat 14,6%
8	Prov. Riau 88,4%	Prov. Nusa Tenggara Barat 68,9%	8	Kota Serang 93,0%	Kota Lingga 45,2%	8	Kab. Jember 93,7%	Kab. Bunu 17,7%
9	Prov. Jawa Tengah 86,9%	Prov. Aceh 74,2%	9	Kota Tangerang 93,0%	Kota Palembang 32,7%	9	Kab. Polewali Mandar 93,3%	Kab. Banggai Laut 18,4%
10	Prov. Sulawesi Barat 86,3%	Prov. Kepulauan Riau 74,7%	10	Kota Surabaya 92,6%	Kota Pagar Alam 53,0%	10	Kab. Bandung Barat 93,0%	Kab. Maybrat 15,2%
11	Prov. Bali 86,4%	Prov. Sulawesi Tengah 74,6%	11	Kota Gorontalo 92,1%	Kota Bima 55,7%	11	Kab. Kuning 93,0%	Kab. Gunungkidul 22,1%
12	Prov. Sumatera Selatan 86,2%	Prov. Kalimantan Barat 74,1%	12	Kota Bogor 91,7%	Kota Ternate 54,1%	12	Kab. Karanganyar 92,4%	Kab. Mamberamo Tengah 22,2%
13	Prov. Sumatera Barat 84,4%	Prov. Banten 76,8%	13	Kota Bekasi 91,3%	Kota Palangkaraya 61,0%	13	Kab. Sragam 92,4%	Kab. Parigi 23,2%
14	Prov. Lampung 83,7%	Prov. Sumatera Utara 77,6%	14	Kota Pekanbaru 91,3%	Kota Medan 61,3%	14	Kab. Tanggar 92,3%	Kab. Sabu Rajua 23,4%
15	Prov. Bangka Belitung 82,2%	Prov. Maluku Utara 76,8%	15	Kota Tanjung Pagar 91,6%	Kota Gunungkidul 60,9%	15	Kab. Bengkulu 92,2%	Kab. Dajjal 23,6%
16	Prov. Gorontalo 81,1%	Prov. Papua Barat 80,1%	16	Kota Kediri 91,3%	Kota Palu 63,4%	16	Kab. Bone Bolango 92,2%	Kab. Dajjal 24,0%
17	Prov. Bengkulu 81,1%	Prov. Sulawesi Utara 80,8%	17	Kota Banjar 91,2%	Kota Lumbi 66,0%	17	Kab. Rokan Hilir 92,2%	Kab. Petai Indrago 24,1%
18	Prov. Sulawesi Utara 80,6%	Prov. Bengkulu 81,1%	18	Kota Cilegon 90,9%	Kota Probolinggo 65,4%	18	Kab. Lahat 92,1%	Kab. Sorong Bagian Barat 25,0%
19	Prov. Papua Barat 80,1%	Prov. Gorontalo 80,7%	19	Kota Tangerang Selatan 90,6%	Kota Padang Panjang 66,6%	19	Kab. Baktar 91,6%	Kab. Pasir Baro 26,3%
20	Prov. Maluku Utara 78,8%	Prov. Bangka Belitung 82,2%	20	Kota Bekasi 90,3%	Kota Metro 63,6%	20	Kab. Cumi 91,3%	Kab. Mamberamo Raya 26,4%

Sumber: Bank Indonesia

Indeks ETPD merupakan instrumen untuk memetakan, memonitor perkembangan ETPD, dan mengukur perbandingan ETPD di suatu daerah relatif terhadap daerah lainnya. IETPD terbagi dalam 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. Aspek implementasi: elektronifikasi transaksi belanja, elektronifikasi transaksi pendapatan, dan penggunaan kanal pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Aspek realisasi: jumlah penerimaan melalui kanal QRIS, jumlah penerimaan melalui kanal nondigital, dan jumlah penerimaan melalui kanal digital.
3. Aspek lingkungan strategis: penggunaan sistem informasi keuangan daerah, kesiapan infrastruktur telekomunikasi, dan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan *awareness*.

Dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh nilai 3,47 dengan predikat Baik. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE.

Sebagai langkah strategis dalam perluasan dan percepatan digitalisasi daerah, Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) melalui Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Selain itu, dalam rangka mendukung tugas Satgas P2DD, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Bank Indonesia (BI) telah mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada tanggal 14 Agustus 2014 yang bertujuan menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar, yang pada gilirannya akan dapat mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien. GNNT juga diharapkan mampu meminimalisir kendala dalam pembayaran tunai, seperti uang tidak diterima karena lusuh/sobek/tidak layak edar dan meningkatkan efisiensi saat transaksi dimana masyarakat tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar. Dengan demikian, dapat meningkatkan efektivitas transaksi yaitu menghindari adanya kesalahan hitung atau *human error*. Pada gilirannya GNNT akan dapat mewujudkan ekosistem *cashless society*.

Seiring dengan upaya meningkatkan GNNT, BI menyadari bahwa sistem pembayaran perlu beradaptasi dengan hadirnya teknologi digital. Untuk itu, BI telah menerbitkan *blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025, yang salah satu visinya mendukung digitalisasi perbankan sebagai 2 (dua) lembaga utama dalam ekonomi dan keuangan digital, baik melalui *open-banking* maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan.

Integrasi ekonomi dan keuangan digital diharapkan akan berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, inklusif, dan berkelanjutan. Upaya BI dalam mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dilakukan melalui kebijakan dan program elektronifikasi yang mencakup ETPD, Elektronifikasi Bantuan Sosial, dan Elektronifikasi Transportasi. Program ini diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan keuangan inklusif, kesehatan fiskal, dan efisiensi ekonomi. Perubahan penggunaan instrumen dari tunai menjadi non tunai memiliki banyak keuntungan yaitu efisiensi dalam *cash handling*, lebih praktis, akses lebih luas, transparansi transaksi, dan identifikasi perencanaan ekonomi yang lebih akurat.

III.1. Digitalisasi Pajak dan Retribusi Daerah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara berkelanjutan terus melakukan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan melaksanakan dan mengimplementasikan program transformasi digital dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Jenis pendapatan daerah yang akan dielektronifikasikan meliputi pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan jenis belanja daerah yang akan dielektronifikasikan meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga.

Secara umum, perkembangan elektronifikasi di Provinsi DKI Jakarta telah terimplementasikan dengan baik. Transaksi pengeluaran/belanja telah 100% terelektronifikasi dan dilakukan secara nontunai melalui teller dan CMS. Sedangkan dari sisi penerimaan juga telah 100% terelektronifikasi meskipun masih terdapat beberapa penerimaan diterima secara nondigital melalui teller. Selain itu, seluruh sistem transaksi pemerintah provinsi DKI Jakarta juga telah terhubung dengan sistem Bank DKI sebagai Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Proporsi penerimaan pajak daerah melalui kanal digital pada tahun 2021 mencapai 49,4%. Sementara, sisanya sebesar 50,6% dilakukan melalui kanal pembayaran semi-digital yaitu melalui *teller & loket bank*. Jenis pajak daerah yang telah sepenuhnya dibayarkan secara digital adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Rokok, dan Pajak Penerangan Jalan. Sementara itu, jenis pajak daerah yang penerimaan digitalnya masih di bawah 50% adalah Pajak Kendaraan Bermotor (41,6%), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (9,7%), Pajak Hiburan (37,7%), dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (41,9%).

Tabel 6. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 2021

Jenis Penerimaan	Teller & Loket Bank	ATM	Integrasi Mobile / SBN Bunting	E-Commerce	Apri Bank	ORIS	EDC	UE Reader	Total	%
Jumlah	5.044.901.318.392	1.412.933.600	84.050.282.720			246.320.647	3.566.847.343		5.044.901.318.392	41,6%
PBBKB		6.314.382	1.056.944.413.743						1.063.258.728.125	100,0%
Pajak Rokok	4.506.374.031.018		3.815.306.580			40.407.361			8.362.087.978	9,7%
Pajak Hiburan	481.982.985.429	6.790.336.417	311.864.384.954	8.189.000					799.867.365.800	100,0%
Pajak Penerangan Jalan	867.769.318.874	38.873.692.962	35.382.222.000	56.753.263					938.883.987.099	49,4%
Pajak Reklamasi		389.115.232	32.334.081.313						33.723.233.545	37,7%
Pajak Restorasi		1.017.648.144	886.183.040.692						1.903.831.234.836	86,8%
Pajak Pertambangan			758.084.497.024						758.084.497.024	37,7%
Pajak Air Tawah	7.251.952.832	128.279.788	56.089.659.115						64.470.971.735	109,0%
Pajak Air Tanah	115.325.073.476	280.342.064	192.256.808.938						587.924.224.478	62,5%
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	195.261.872.266	1.746.054.550	3.983.166.100.054						5.924.482.026.870	73,3%
Pajak Hotel	177.473.487.069	830.175.890.411	2.271.482.200.117						3.879.131.577.597	41,9%

Sumber: Bapenda Provinsi DKI Jakarta (diolah)

Perkembangan pembayaran pajak daerah melalui kanal digital pada tahun 2021 mengalami kenaikan 16,7%. Sebelumnya pada tahun 2020, sebanyak 67,3% pembayaran pajak daerah dilakukan melalui *teller* dan loket bank, dan pada tahun 2021 turun menjadi 50,6% seiring dengan perubahan preferensi masyarakat dalam membayar pajak daerah. Kanal pembayaran digital yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah kanal Internet/Mobile/SMS Banking, yaitu tumbuh sebesar 14,7% dari proporsi 19,3% pada tahun 2020 menjadi 34% pada tahun 2021. Sementara itu kanal pembayaran QRIS masih tumbuh lambat dari 0,002% di tahun 2020 menjadi 0,009% di tahun 2021. Namun secara nominal, kanal pembayaran QRIS mengalami kenaikan cukup signifikan dari Rp518.679.730 menjadi 2.996.813.842.

Tabel 7. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Per Kanal Pembayaran 2020-2021

Jenis	Kanal Pembayaran	2020		2021		Δ Proporsi
		Rp	Proporsi	Rp	Proporsi	
Semi Digital	Teller & Loket Bank	21.478.166.394.152	67,3%	17.475.484.413.298	50,6%	▼ -16,7%
	ATM	999.193.865.246	3,1%	880.731.608.270	2,6%	▼ -0,6%
Digital	Internet/Mobile/SMS Banking	6.159.467.598.265	19,3%	11.733.833.988.325	34,0%	▲ 14,7%
	E-Commerce	209.482.623.472	0,7%	431.001.394.128	1,2%	▲ 0,6%
	Agen Bank	-	0%	-	0%	▲ 0,0%
	QRIS	518.679.730	0,002%	2.996.813.842	0,009%	▲ 0,0%
	EDC	3.048.434.116.758	9,6%	3.981.821.299.924	11,5%	▲ 2,0%
	UE Reader	-	0%	-	0%	▲ 0,0%
Total		31.895.263.277.623		34.505.859.517.787		

Sumber: Bapenda Provinsi DKI Jakarta (diolah)

Proporsi penerimaan retribusi daerah melalui kanal pembayaran digital pada tahun 2021 mencapai 19,6%. Kanal pembayaran digital yang paling banyak digunakan adalah ATM, dengan nilai penerimaan mencapai Rp38.907.166.397, atau 10,1% dari total penerimaan untuk seluruh kanal pembayaran. Kanal Internet/Mobile/SMS Banking mencapai Rp322.285.980, (0,1%), dan penerimaan kanal e-commerce mencapai Rp36.043.436.134 (9,4%). Sampai dengan akhir tahun 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah bekerja dengan 4 (empat) marketplace, yaitu Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan Traveloka.

Tabel 8. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2021

Jenis Penerimaan	Teller & Loket Bank	ATM	Internet/Mobile/SMS Banking	E-Commerce	Agen Bank	QRIS	EDC	UE Reader	Total
Rp. Total Penerimaan	21.478.166.394.152	26.974.078.816	129.141.160	8.014.783.393	-	-	-	-	226.592.169.521
Retribusi Jasa Usaha	20.093.398.800	9.531.640.405	123.144.520	6.629.187.828	-	-	-	-	36.356.361.553
Retribusi Pengawasan	211.881.837.648	2.281.647.174	-	1.385.595.565	-	-	-	-	215.549.080.387
Total	211.881.837.648	2.281.647.174	123.144.520	8.014.783.393	-	-	-	-	226.592.169.521

Sumber: Bapenda Provinsi DKI Jakarta (diolah)

III.1.1. Digitalisasi Pajak Daerah

1. JakPenda dan e-Wallet pada Super Apps Jakarta Kini (JAKI)

JAKI adalah sistem aplikasi terintegrasi yang dibentuk dengan tujuan sebagai pusat informasi, interaksi, dan transaksi resmi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola oleh Unit Pengelola Jakarta Smart City. JAKI dikembangkan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik masyarakat berbasis Teknologi, Informasi dan Komputer (TIK) di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta.

Salah satu fitur dalam Super-Apps JAKI adalah fitur JakPenda. Dalam fitur tersebut, masyarakat tidak hanya dapat mengakses informasi perpajakan seperti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2, namun masyarakat dapat melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara langsung. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah bekerja sama dengan Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait tanda tangan elektronik pada dokumen e-SPPT PBB-P2.

JakPenda dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran melalui beragam kanal pembayaran seperti ATM, E-Banking, uang elektronik, dan QRIS.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengembangkan fitur e-wallet pada Super-Apps JAKI untuk semakin mempermudah proses pembayaran. Saat ini, JAKI telah terkoneksi dengan Jak-One Pay dan rencananya akan dikembangkan dengan e-wallet lainnya. Selain itu, JakPenda merupakan salah satu fitur terpopuler di JAKI dengan total 11.898.476 kali dilihat oleh masyarakat¹.

Gambar 2. Fitur JakPenda pada Super-Apps JAKI



Sumber: Bapenda Provinsi DKI Jakarta

2. Sistem Pajak Online

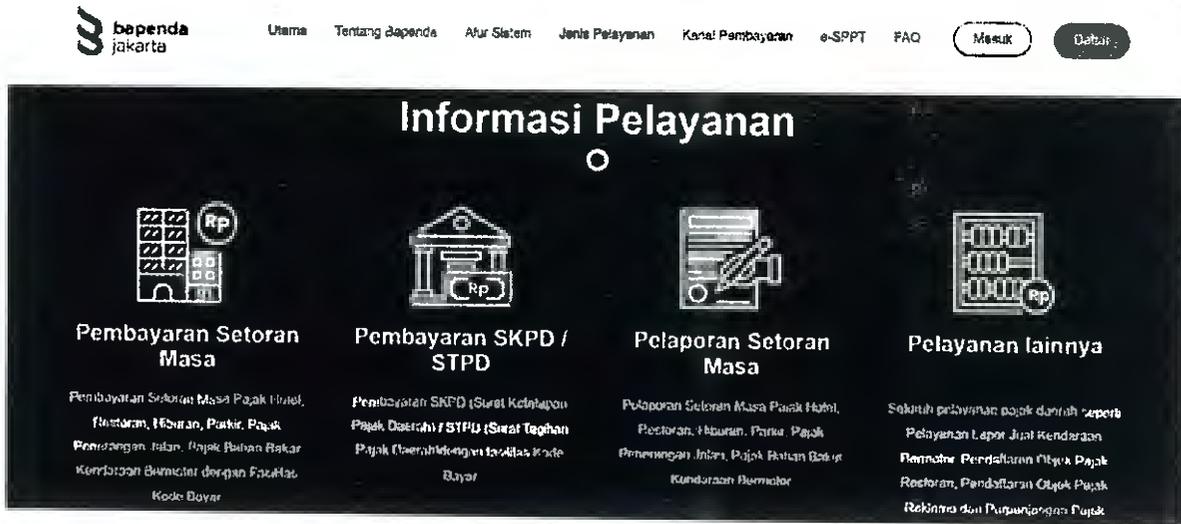
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengembangkan sistem pajak online (<https://pajakonline.jakarta.go.id>) untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam sistem pajak *online*, masyarakat dan pihak terkait lainnya seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Agen Pemegang Merek (APM) dapat memperoleh pelayanan seperti pelaporan dan pembayaran setoran masa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan fasilitas kode bayar. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pembayaran Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), dan pelayanan pajak daerah lainnya seperti pelayanan lapor jual kendaraan bermotor serta pendaftaran dan perpanjangan objek pajak restoran dan pajak reklame.

¹ Data hingga Februari 2022 (Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah mengembangkan pelayanan terkait pajak daerah lainnya melalui Bapenda Digital Service. Salah satu jenis pelayanan yang diberikan adalah kemudahan bagi Agen Pemegang Merek (APM) untuk mengajukan permohonan nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

Seiring meningkatnya transaksi pada sektor properti dan untuk meminimalisir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan pelayanan BPHTB dengan memperkenalkan fitur e-BPHTB. Wajib Pajak/PPAT dapat memperoleh pelayanan BPHTB sejak pelaporan hingga pembayaran secara digital.

Gambar 3. Sistem Pajak Online

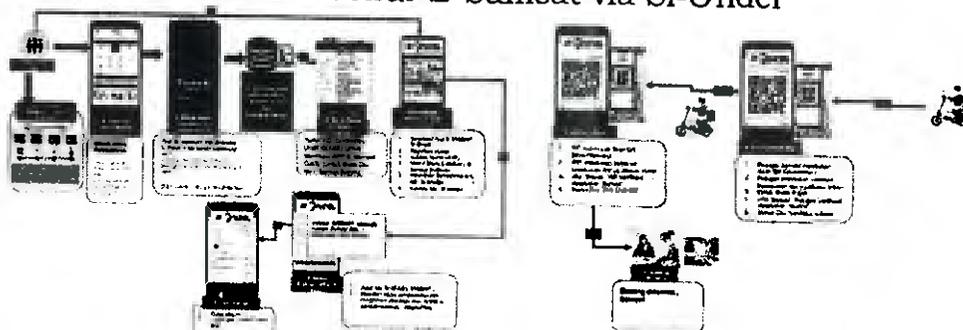


Sumber: Bapenda Provinsi DKI Jakarta

3. Samsat Online Delivery (Si-Ondel)

Si-Ondel merupakan aplikasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) akan dikirim ke alamat Wajib Pajak. Aplikasi tersebut dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama Polda Metro Jaya, PT Jasa Raharja, Bank DKI, dan PT Anterin Digital Nusantara (apikasi Anterin).

Gambar 4. Alur E-Samsat via Si-Ondel



Sumber: Bapenda Provinsi DKI Jakarta

4. Tabungan Pajak

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Bank DKI telah meluncurkan program Tabungan Pajak yaitu tabungan yang diperuntukan untuk menabung secara disiplin setiap bulan agar mudah dalam pembayaran pajak DKI Jakarta. Untuk meningkatkan keikutsertaan dalam program Tabungan Pajak, diberikan beberapa insentif seperti suku bunga di atas suku bunga tabungan regular (3,50%), bebas biaya administrasi, setoran ditentukan oleh Bank DKI yang dihitung dari biaya pajak yang akan dibayarkan Nasabah, setoran bulanan difasilitasi dengan sistem *autodebet* sehingga nasabah tidak perlu melakukan setoran sendiri.

Gambar 5. Tabungan Pajak

TABUNGAN PAJAK
Orang Bijak Buka Tabungan Pajak

- TERENCANA
- LEBIH BUNGA
- LEBIH UNTUNG
- TEPAT WAKTU
- TANPA RESET

Bayar Pajak Lebih Mudah dan Terencana
Info lengkap, klik : 021-77702000

Sumber: Bank DKI

III.1.2. Digitalisasi Retribusi Daerah

1. QRIS Dinamis

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berhasil mengembangkan fitur pembayaran melalui QRIS untuk setiap jenis retribusi daerah. Melalui fitur tersebut, masyarakat dapat melakukan pembayaran retribusi melalui berbagai macam aplikasi seperti JakOnePay, DANA, Gopay, OVO LinkAja, GoMobile, Sakuku, dan aplikasi lainnya yang menerima QRIS.

Gambar 6. Surat Setoran Retribusi Daerah dengan QRIS Dinasmis



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS PENANJAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA
UNTUK PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KETAHAPAN KEMBARANGAN

SKRIPSI SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SRSD)
 Nomor : 2180713163

SURYA BRONDO LAY
 DESUN KEMARA KARYA RT 004 RW 004 KELURAHAN TANJUNGPINANG KEC. KEMARA PERUM

Mengantar berdasarkan : SKSD
 Nomor berdasarkan : 2180713163
 Tanggal jatuh tempo : 28 November 2019

No	Kode Rekening	Catatan Rekening	Jumlah Upr
1	412.01.13.001	Retribusi dan Monev/Inspeksi Revisi	Rp. 500.000,00
Jumlah Keseluruhan			Rp. 500.000,00

Dengan Hormat, Kami Kami Sampaikan

Tanggal terbitnya surat ini dan telah dibayar
 Tanggal : 24 Oktober 2019
 Tempat :
 Nama :
SURYA BRONDO LAY

Tanggal terbit Surat Keputusan : Tidak Ada

PEMBERITAHUAN
PEMBAYARAN SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SRSD) DAPAT
DILAKUKAN MELALUI QRIS

1. **FASILITAS PEMBAYARAN MELALUI QRIS**
 Melalui QRIS, masyarakat dapat melakukan pembayaran retribusi daerah dan melakukan sebagai berikut :

<p>A. Untuk QRIS DOK</p> <p>B. Untuk QRIS DOK</p> <ul style="list-style-type: none"> Menggunakan kartu ATM dan PIN yang sesuai Melakukan pembayaran melalui QRIS DOK 	<p>C. Untuk QRIS DOK</p> <p>D. Untuk QRIS DOK</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pembayaran melalui QRIS DOK
---	---

2. **TUNGGUAN**
 Kurang lebih 10 menit
 Setelah melakukan pembayaran melalui QRIS DOK, masyarakat akan menerima QRIS DOK yang menunjukkan bahwa pembayaran telah dilakukan.

3. **QRIS DOK**
 QRIS DOK adalah QRIS yang menunjukkan bahwa pembayaran telah dilakukan.

4. **APLIKASI YANG BISA DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN QRIS**
 QRIS DOK dapat digunakan melalui aplikasi QRIS DOK yang tersedia di Play Store dan App Store.

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta

Penggunaan QRIS dalam pembayaran retribusi daerah memberikan keuntungan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di antaranya adalah tidak terdapatnya biaya MDR dan memenuhi protokol kesehatan karena dapat dilakukan tanpa kontak fisik.

QRIS yang digunakan untuk pembayaran retribusi daerah merupakan jenis QRIS Dinamis sehingga dapat melacak data transaksi karena satu QRIS digunakan untuk satu transaksi. Selain itu, masyarakat juga dimudahkan karena tidak perlu menginput nominal transaksi dan hanya perlu melakukan konfirmasi atas tagihan yang muncul.

Gambar 7. Pembayaran Retribusi Daerah Melalui QRIS



Dalam rangka percepatan implementasi QRIS dalam penerimaan pembayaran pendapatan daerah telah diterbitkan Instruksi Gubernur Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penerimaan Pembayaran Pendapatan Daerah melalui QRIS.

2. Mobile Point of Sale (MPOS) pada Museum

Dalam rangka perluasan digitalisasi pembayaran pada tempat wisata, Bank DKI telah menyediakan MPOS yang dapat mengakomodir pembayaran menggunakan QRIS dan uang elektronik pada Museum Bahari, Museum Tekstil, Museum Seni Rupa, dan Museum Wayang.

III.2. Digitalisasi Belanja Daerah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengimplementasikan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) *Online* sejak tahun 2017. SP2D *Online* merupakan aplikasi yang pertama kali dikembangkan oleh Bank DKI bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai solusi permasalahan penyetoran pajak atas belanja daerah.

Dengan layanan ini, penyetoran pajak yang dilakukan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menjadi lebih mudah karena cukup dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi antara sistem keuangan Pemda, sistem perbankan, *billing* pajak, dan sistem penerimaan negara (MPN) sehingga Kuasa BUD tidak perlu lagi datang ke *teller* untuk menyetorkan pajak atas potongan belanja daerah.

Melalui SP2D *Online*, penyetoran pajak dilakukan bersamaan dengan proses pencairan dana atau timbulnya kewajiban perpajakan sehingga kepatuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Selain itu, kanal yang digunakan untuk penyetoran pajak atas belanja daerah menggunakan kanal internet banking atas Cash Management System (CMS).

SP2D *online* dapat digunakan untuk jenis transaksi SP2D baik UP (Uang Persediaan), GU (Ganti Uang), TU (Tambah Uang), LS (Langsung), dengan rekening tujuan yang berada pada Bank DKI dan atau bank lain.

III.3. Cakupan Jaringan dan Internet

Cakupan jaringan internet di Provinsi DKI Jakarta telah menjangkau hingga Kelurahan termasuk RW Kumuh sebanyak 445 RW. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 8 bahwa 98.9% Kelurahan di wilayah DKI Jakarta telah tersedia jaringan 4G/LTE.

Tabel 9. Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler Tahun 2021

Kepulauan Seribu	5	1	-	-
Jakarta Selatan	64	-	-	1
Jakarta Timur	65	-	-	-
Jakarta Pusat	44	-	-	-
Jakarta Barat	56	-	-	-
Jakarta Utara	31	-	-	-
DKI Jakarta kota	265	1	-	-

Sumber: BPS (diolah)

Kecepatan jaringan komunikasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta memiliki *bandwidth* dari 10 Mbps hingga 100 Mbps yang tersebar di berbagai lokasi. Penyedia jaringan komunikasi yang telah bekerja sama dengan Provinsi DKI Jakarta yaitu PT Telkom, PT Balitower, PT JDN, PT Hipernet, PT Mora Telematika Indonesia, PT HSP, dan PT Arthanet.

Dalam rangka mendukung penetrasi internet di masyarakat dan mendorong penggunaan produk layanan digital, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan program JakWiFi. Melalui program tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun lebih dari sembilan ribu titik internet gratis untuk mendukung aktivitas internet masyarakat.

III.4. Infrastruktur Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)

III.4.1. Jumlah Jaringan Layanan Perbankan dan Nonbank di DKI Jakarta

Jasa layanan perbankan nasional sebagian besar berkantor pusat di Provinsi DKI Jakarta dengan jaringan kantor cabang sebanyak 456 Kantor Cabang (*Sumber: Statistik Perbankan Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan*). Dari sisi layanan penyedia jasa pembayaran tercatat 48 PJP yang terdiri dari 28 PJP Bank dan 20 PJP nonbank yang telah memiliki layanan pembayaran terkini yaitu *e-wallet* dan QR. PJP tersebut juga didukung dan terhubung pada 4 (empat) lembaga *switching* nasional yakni Alto, Rintis, Jalin, dan Artajasa.

III.4.2. Bank Pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) Bank RKUD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 512 Tahun 2009, Gubernur DKI Jakarta telah menunjuk PT Bank DKI sebagai tempat Penyimpanan RKUD, Rekening Penerima, dan Rekening Pengeluaran. Bank DKI merupakan Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 2 (KBMI 2) dengan modal inti di atas Rp6 triliun-14 triliun. Modal dasar yang dimiliki oleh Bank DKI sebesar Rp11.500.000.000.000 dan modal disetor Bank DKI sebesar Rp4.431.159.000.000 (*Sumber: Bank DKI*).

III.4.3. Cash Management System (CMS) dan Produk Layanan Nontunai yang dimiliki Bank Pengelola RKUD

Teknologi berbasis digital hadir untuk melakukan pelayanan yang lebih optimal dan efisien kepada nasabah tanpa harus ke bank. Hal tersebut juga merupakan solusi perbankan untuk melakukan monitoring dan transaksi keuangan nasabah korporasi secara *real time* dan *online*. CMS Bank DKI hadir untuk mengontrol tata kelola keuangan untuk pemilik bidang usaha. Layanan CMS tersebut berguna dalam meminimalisir risiko terjadinya hal-hal yang merugikan bisnis pihak perusahaan seperti terjadinya kebocoran finansial.

Keberadaan CMS dan produk layanan nontunai yang dimiliki Bank DKI telah mendukung penerapan transaksi perbankan nontunai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bank DKI melayani sistem manajemen kas hingga ke tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) DKI Jakarta.

Gambar 8. Layanan Cash Management System Bank DKI

Sumber: Bank DKI

III.4.4. Kanal Pembayaran dan Jumlah Infrastruktur Bank DKI

Bank DKI memiliki kanal terkini, di antaranya: Mesin EDC, Mesin MPOS (Mobile Point of Sales), JakOne Mobile, CMS, Kartu Debit GPN, dan Kartu Prepaid (JakCard). Adanya kanal tersebut mendukung penerapan transaksi perbankan nontunai di wilayah Provinsi DKI Jakarta serta mengoptimalkan upaya sinergi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). PT Bank DKI secara berkala melakukan pemeliharaan atas layanan pada kanal yang tersedia sehingga kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi dapat dinikmati oleh nasabah-nasabah Bank pengelola RKUD.

Jumlah infrastruktur Bank DKI terdiri dari kantor pusat yang berlokasi di Jakarta serta infrastruktur lainnya sebagai berikut:

- Kantor cabang konvensional: 14 kantor
- Kantor cabang syariah: 2 kantor
- Kantor cabang pembantu konvensional: 220 kantor
- Kantor cabang pembantu syariah: 14 kantor
- Kantor kas konvensional: 163 kantor
- Kantor kas syariah: 6 kantor
- Kantor fungsional: 8 kantor
- Layanan syariah: 228 kantor
- ATM: 698 unit
- Mesin EDC: 3,967 unit
- MPOS: 1.488 unit
- Kanal pendukung lainnya: JakOne Mobile, CMS, Kartu Debit, dan Kartu pra bayar.

Selain itu, terdapat kerja sama yang dimiliki Bank DKI dalam layanan nontunai:

1. Bank DKI bekerja sama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah meluncurkan aplikasi Si-Ondel yang merupakan aplikasi teknologi informasi pembayaran PKB inovatif.

2. Keunggulan kompetitif Bank DKI dibandingkan bank lain yaitu merupakan BPD pertama sebagai *pioneer smartcard* (JakCard) yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan *Electronic Payment* (e-Payment) di *merchant* yang telah bekerja sama dengan Bank DKI. Saat ini JakCard telah mendukung berbagai program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem Jakarta One yang dapat diintegrasikan dengan program-program Pemerintah Provinsi DKI yang terkait dengan Moda Transportasi Integrasi (MRT, Transjakarta, dan LRT), KJP, Rumah Susun, PKL dan lain-lain.
3. Kerja sama Bank DKI dengan Petrokimia Gresik tentang pemanfaatan JakOne Pay sebagai e-Wallet aplikasi K3PG Mobile tanggal 25 November 2020. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Layanan Perbankan antara PT Bank DKI dengan Gopay terkait Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB P2) pada tanggal 23 September 2020.
4. Kerja sama dengan salah satu perusahaan *fintech* dalam rangka mengembangkan *smart building management & community engagement* yang dapat diterapkan untuk mengelola ekosistem transaksi keuangan digital di rusun, pasar, hunian terintegrasi, stadion, bandara dan sejenisnya yang akan dimulai di Bulan Juni 2022.

III.5. Lingkungan Strategis

III.5.1. Arah Kebijakan dan Regulasi dalam Mendukung Digitalisasi Daerah dan Pemulihan Ekonomi

Arah kebijakan Pemerintah di Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung digitalisasi daerah dan pemulihan ekonomi daerah tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 dan dalam Keputusan Gubernur Nomor 435 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

Keberadaan regulasi pendukung ETP dan *e-government* mendukung implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah dan *e-government* tertuang dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Transaksi Belanja diatur dalam Instruksi Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Transaksi Nontunai;
- Transaksi Penerimaan Pendapatan Daerah diatur dalam:
 - Peraturan Gubernur Nomor 204 Tahun 2014 tentang Sistem Penerimaan Pajak Daerah Secara Elektronik;
 - Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Daerah secara Elektronik;
 - Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara Elektronik;
 - Instruksi Gubernur Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penerimaan Pembayaran Pendapatan Daerah melalui QRIS.

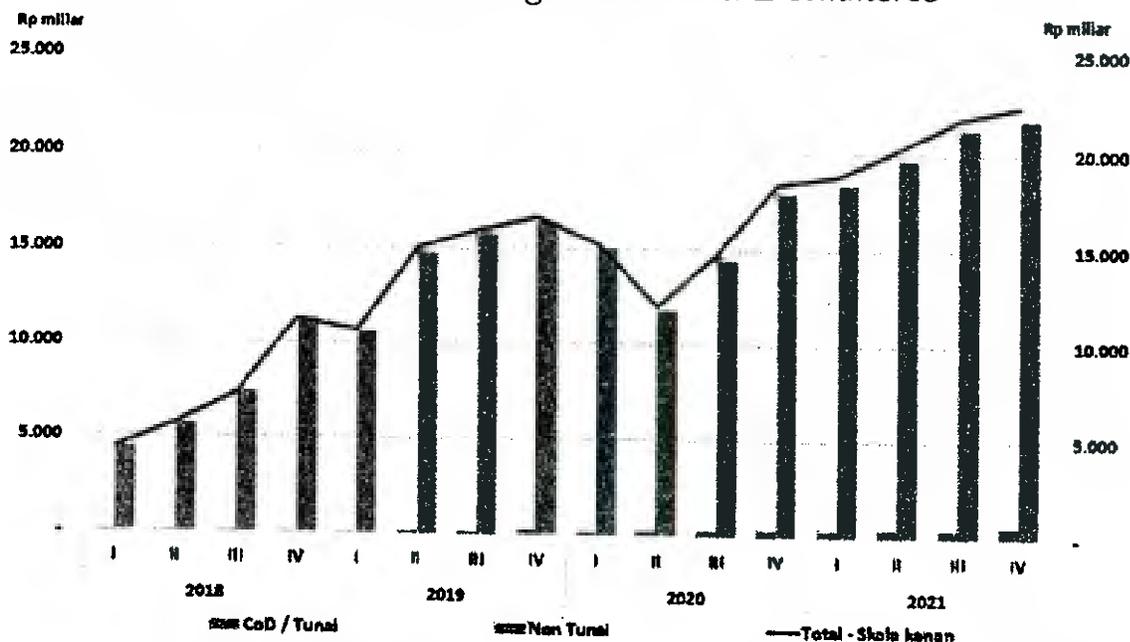
- Digitalisasi Daerah:

- Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penugasan kepada BUMD untuk Menyelenggarakan Sistem Integrasi Pembayaran Antar Moda Transportasi;
- Keputusan Sekda Nomor 45 Tahun 2020 tentang Tim Asesmen Transformasi Digital Provinsi DKI Jakarta;
- Instruksi Sekda Nomor 122 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Asesmen Transformasi Digital;
- Instruksi Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Transformasi Digital;
- Keputusan Gubernur Nomor 1251 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan Pelaksanaan Transformasi Digital;

III.5.2. Tingkat Literasi Nontunai dan Digital Masyarakat

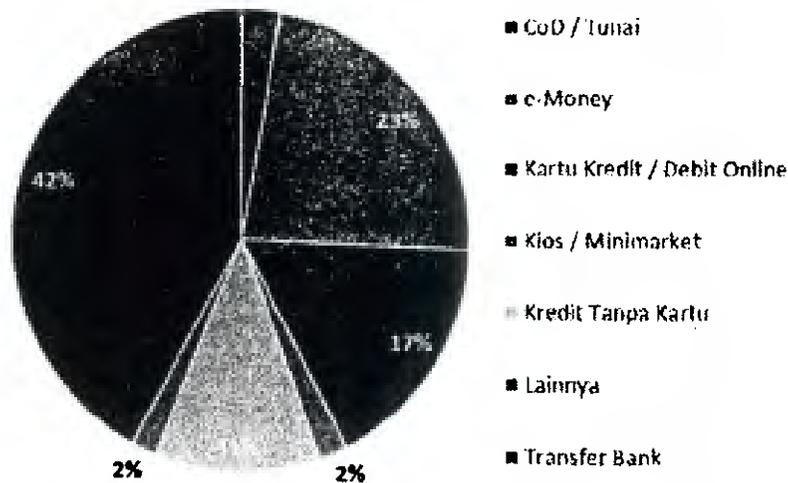
Tingkat literasi nontunai dan digital masyarakat DKI Jakarta apabila dilihat dari sisi preferensi pembayaran nontunai pada *e-commerce* di triwulan IV 2021 mengalami peningkatan, sejalan dengan pergeseran perilaku masyarakat dalam penggunaan teknologi digital di tengah dinamika penyebaran Covid-19. Nilai transaksi *e-commerce* pada triwulan IV 2021 mencapai Rp21,7 triliun atau meningkat 8% (qtq) dari triwulan sebelumnya yang sebesar Rp22,4 triliun sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 7.

Grafik 7. Perkembangan Transaksi *E-commerce*



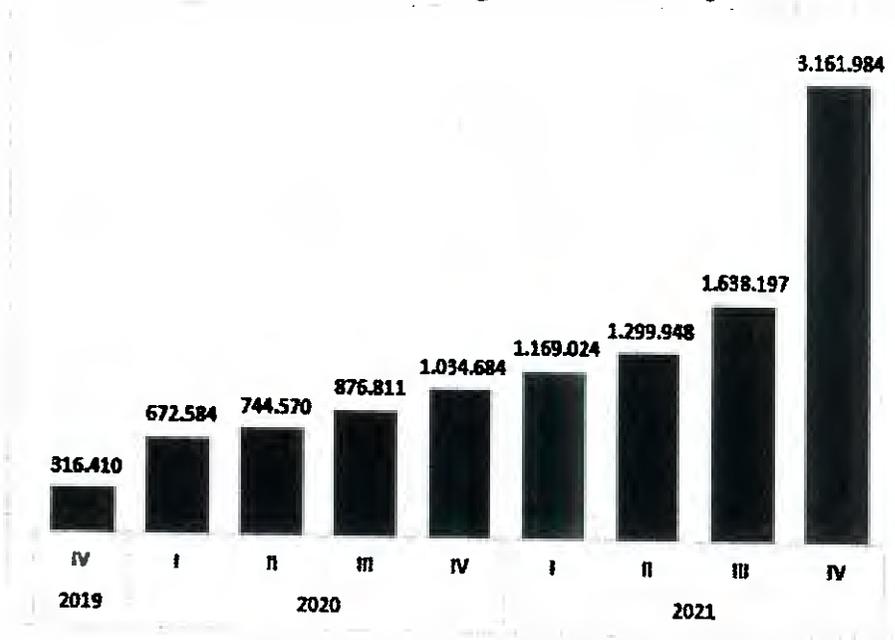
Sumber: 4 (empat) e-commerce lokal terbesar (diolah)

Berdasarkan metode pembayarannya, masyarakat cenderung menggunakan transfer bank (42%), *e-money* (23%), dan kartu kredit/debit *online* (17%) sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 8. Kenaikan transaksi *e-commerce* terutama terjadi pada metode kartu kredit/debit *online*, transfer bank, dan kredit tanpa kartu. Hal ini sejalan dengan pergeseran perilaku masyarakat yang saat ini lebih memilih untuk berbelanja melalui *e-commerce*.

Grafik 8. Pangsa Transaksi *E-commerce*

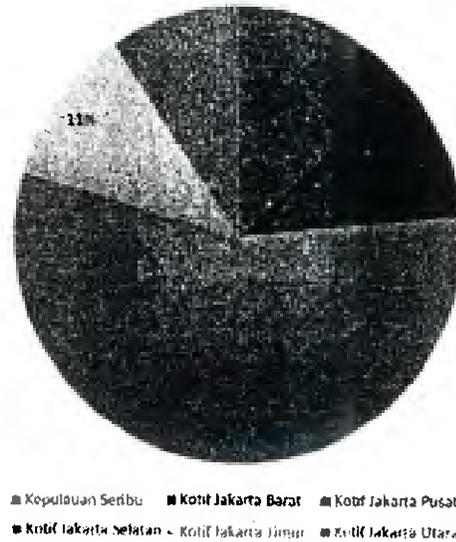
Sumber: 4 (empat) e-commerce lokal terbesar (diolah)

Dalam rangka meningkatkan penggunaan transaksi pembayaran secara nontunai di masyarakat, Bank Indonesia terus mendorong perluasan penggunaan QRIS pada pasar dan pusat perbelanjaan. Jumlah *merchant* QRIS di Jakarta pada akhir triwulan IV 2021 mencapai 3,16 juta *merchant*, naik 93% (qoq) di tengah pandemi sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 9.

Grafik 9. Perkembangan *merchant* QRIS

Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Berdasarkan wilayah, jumlah *merchant* tertinggi diduduki oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan yang mencapai 55,94% dari total *merchant* dan disusul oleh Jakarta Barat 12,98% (Grafik 10).

Grafik 10. Sebaran *merchant* QRIS

Sumber: Bank Indonesia (diolah)

IV. RENCANA AKSI

Rencana aksi perluasan dan percepatan ETPD 2022-2025 termuat dalam uraian target proporsi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan kanal pembayaran digital. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun rencana aksi yang berisikan program kerja, keterangan, target, tahun penyelesaian, dan penanggung jawab.

IV.1. Target Proporsi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Kanal Pembayaran Digital

Jenis	Jenis Penerimaan	Baseline (2021)	Target Kanal Pembayaran Digital			
			2022	2023	2024	2025
Pajak Daerah	PKB	42%	45%	48%	51%	54%
	PBBKB	100%	100%	100%	100%	100%
	BBNKB	10%	20%	30%	40%	50%
	Pajak Rokok	100%	100%	100%	100%	100%
	Pajak Hotel	44%	47%	50%	53%	56%
	Pajak Restoran	60%	61%	62%	63%	64%
	Pajak Hiburan	38%	41%	44%	47%	50%
	Pajak Reklame	96%	97%	98%	99%	99%
	Pajak Penerangan Jalan	100%	100%	100%	100%	100%
	Pajak Air Tanah	87%	88%	89%	90%	91%
	Pajak Parkir	63%	64%	65%	66%	67%
	BPHTB	73%	74%	75%	76%	77%
	PBB-P2	42%	45%	48%	51%	54%
Retribusi Daerah	Retribusi Jasa Umum	33,4%	38%	43%	48%	53%
	Retribusi Jasa Usaha	38,6%	42%	45%	48%	51%
	Retribusi Perizinan Tertentu	10,1%	20%	30%	40%	50%

IV.2. Rencana Aksi Tahun 2022

No	Program Kerja	Keterangan	Target	Tahun Penyelesaian	Penanggung Jawab
1	Transformasi Digital Pemungutan Retribusi	Transformasi digital retribusi daerah melalui optimalisasi integrasi sistem e-retribusi dengan aplikasi <i>stakeholder</i> terkait untuk kemudahan pelayanan kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Integrasi dengan Jakevo DPMPSTP - Integrasi dengan Portal pajak online - Integrasi dengan aplikasi JAKI 	2022	<ul style="list-style-type: none"> - Bapenda - Diskominfo - DPMPSTP - BPKD - Bank DKI
2	Transformasi Digital Pemungutan Pajak	Transformasi digital pemungutan pajak daerah dengan implementasi tanda tangan elektronik, permohonan online, dan integrasi dengan <i>stakeholder</i> terkait.	<ul style="list-style-type: none"> - Digitalisasi permohonan Nilai Jual Kendaraan Bermotor PKB-BBNKB - Integrasi IMB dengan PBB - Implementasi <i>coretax system</i> 	2022	<ul style="list-style-type: none"> - Bapenda - Diskominfo - DPMPSTP
3	Sosialisasi pembayaran pajak dan retribusi secara nontunai	Sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran secara nontunai.	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi kepada wajib pajak PBB, PKB, dan Pajak Daerah lainnya - Sosialisasi kepada OPD pemungut retribusi 	2022	<ul style="list-style-type: none"> - Bapenda - BPKD - Diskominfo - Bank DKI
4	Implementasi pelaksanaan SP2D Online dengan pajak pusat yang dikelola oleh DJP	Implementasi di tahun 2022	100%	2022	<ul style="list-style-type: none"> - BPKD - Bank DKI
5	Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah	Penggunaan tanda tangan elektronik pada Surat Penyediaan Dana (SPD)	Penggunaan tanda tangan elektronik pada SPD	2022	BPKD
6	Penggunaan <i>mobile banking</i> oleh Pegawai Pemerintah Provinsi	Sosialisasi dan himbauan penggunaan <i>mobile banking</i>	100%	2022	Bank DKI
7	Penggunaan QRIS pada berbagai sentra layanan publik seperti pasar dan pusat perbelanjaan	<i>On boarding</i> dan perluasan akuisisi QRIS pada pasar dan pusat perbelanjaan	Menuju 3,9 juta Pengguna di DKI Jakarta	2022	<ul style="list-style-type: none"> - BI DKI Jakarta - Penyedia Jasa Pembayaran
8	Edukasi dan sosialisasi dalam rangka perluasan QRIS di Wilayah DKI Jakarta	Sosialisasi kepada ekosistem di Provinsi DKI Jakarta	Menuju 15 juta <i>merchant</i> nasional dan 3,9 juta pengguna di DKI Jakarta	2022	<ul style="list-style-type: none"> - BI DKI Jakarta - Penyedia Jasa Pembayaran
9	Digitalisasi Pembayaran Bansos kepada Warga Miskin DKI Jakarta	Penyaluran Bansos melalui rekening dan ATM	<ul style="list-style-type: none"> - Program KLJ - Program KPDJ - Program KAJ - Kartu Peduli Anak Remaja Jakarta 	2022	<ul style="list-style-type: none"> - Dinsos - Bank DKI

No	Program Kerja	Keterangan	Target	Tahun Penyelesaian	Penanggung Jawab
10	Digitalisasi Bantuan Sosial dalam rangka perlindungan sosial kepada warga miskin	Sosialisasi kepada masyarakat penerima bansos di DKI Jakarta	Sosialisasi bantuan sosial secara digital dan pengecekan penerima bansos PKD melalui aplikasi JAKI atau www.jakarta.go.id	2022	- Dinas Sosial - Diskominfotik - Bank DKI
11	Transformasi digital pembayaran pada terminal dan pelabuhan penyebrangan	Penerapan pembayaran nontunai pada terminal dan pelabuhan	- Penyediaan <i>e-ticketing</i> pada pelabuhan penyebrangan (Kepulauan Seribu) - Ujicoba aplikasi JacketBus pada terminal terpadu	2022	- Dinas Perhubungan - Bank DKI
12	Elektronifikasi Integrasi Pembayaran Transportasi Umum JABODETABEK (EIPTJ)	Elektronifikasi dan integrasi tarif dan sistem pembayaran angkutan umum massal di Provinsi DKI Jakarta	- Implementasi aplikasi JakLingko - Skema tarif Integrasi JakLingko - Finalisasi skema <i>Account Based Ticketing (ABT)</i> pada aplikasi JakLingko - Perluasan kanal pembayaran transportasi umum angkutan darat	2022	- Dinas perhubungan - PT Jaklinko Indonesia
13	Transformasi Digital Pemasaran UKM	- Pendaftaran Jakpreneur dengan menggunakan QRIS - Fasilitasi UKM dengan pemasaran digital - Fasilitasi Penggunaan QRIS pada bazar/pameran	- 10.000 Pendaftar Program Jakpreneur - 500 UKM terdaftar - 300 Bazar/Pameran	2022	- Dinas PPKUM - Bank DKI
14	Digitalisasi pembayaran pada tempat wisata di Provinsi DKI Jakarta	Penerapan <i>cashless</i> untuk pembayaran <i>ticketing</i> menggunakan uang elektronik pada tempat wisata yang dikelola Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Dinas Kebudayaan (museum)	- Digitalisasi pada Monumen Nasional dan Graha Wisata di Ragunan dan TMII - Digitalisasi pada museum	2022	- Dinas Pariwisata - Bank DKI - Dinas Kebudayaan

IV.3. Rencana Aksi 2023-2025

No	Program Kerja	Keterangan	Target	Tahun Penyelesaian	Penanggung Jawab
1	Perluasan capaian pembayaran Pajak dan Retribusi secara nontunai	Persentase pembayaran nontunai pada pajak dan retribusi terus meningkat seiring jalannya waktu sehingga pembayaran tunai digantikan pada pembayaran non tunai	Realisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah sebesar 50% menggunakan kanal digital	2023-2025	- Bapenda - Bank DKI
2	Transformasi digital pemungutan pajak dan retribusi digital daerah	Upaya digitalisasi rangkaian pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan integrasi, digitalisasi, dan perluasan basis data dengan <i>stakeholder</i> terkait	- Pelayanan pajak dan retribusi secara digital - Perluasan basis data untuk optimalisasi pendapatan daerah bersama dengan <i>stakeholder</i> terkait (<i>Big Data</i>)	2023-2025	- Bapenda - Penyedia Jasa Pembayaran Bank maupun Non Bank
3	Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah	Penggunaan tanda tangan elektronik pada SP2D	Uji Coba Penggunaan tanda tangan elektronik pada SP2D	2023-2025	BPKD
4	Edukasi dan perluasan digitalisasi pembayaran menggunakan kanal pembayaran QRIS di Wilayah DKI Jakarta	Sosialisasi dan perluasan kepada ekosistem di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan <i>blueprint</i> sistem pembayaran Bank Indonesia 2025	Peningkatan penerimaan pembayaran digital masyarakat	2023-2025	- BI DKI Jakarta - Penyedia Jasa Pembayaran
5	Digitalisasi Pembayaran Bansos kepada warga miskin DKI Jakarta	Ujicoba digitalisasi biometrik pada penerima bansos	- Program KLJ - Program KPDJ - Program KAJ - Kartu Peduli Anak Remaja Jakarta	2023-2025	- Dinsos - Bank DKI
6	Digitalisasi Bantuan Sosial dalam rangka perlindungan sosial kepada warga miskin	Sosialisasi kepada masyarakat penerima bansos di DKI Jakarta	Sosialisasi bantuan sosial secara digital dan pengecekan penerima bansos PKD melalui aplikasi JAKI atau www.jakarta.go.id	2023-2025	- Dinas Sosial - Diskominfotik - Bank DKI
7	Integrasi dan Pembangunan <i>database</i> produksi terminal	Pengembangan sistem manajemen terminal di 5 terminal tipe A di DKI Jakarta	Pengembangan aplikasi JaketBus pada 5 terminal tipe A	2023-2025	- Dishub - Bank DKI
8	Penyediaan aplikasi untuk kewajiban retribusi terminal online	Penyediaan layanan berbasis aplikasi	Pembayaran retribusi online terintegrasi SIMPAD	2023-2025	- BPKD - Dishub - Bank DKI
9	Elektronifikasi Integrasi Pembayaran Transportasi Umum JABODETABEK (EIPTJ)	Elektronifikasi dan integrasi tarif dan sistem pembayaran angkutan umum masal di Provinsi DKI Jakarta	- Implementasi <i>Account Based Ticketing</i> (ABT) pada aplikasi Jak Lingko - Integrasi tarif dan sistem pembayaran dengan KCI (KRL dan <i>Railink</i>) - Implementasi aplikasi JakLingko ditingkatkan	2023-2025	- Dishub - PT Jaklinko Indonesia

No	Program Kerja	Keterangan	Target	Tahun Penyelesaian	Penanggung Jawab
			dengan fitur Bayar & Beli - Perluasan implementasi JakLingko untuk transportasi penyebrangan - Penerapan <i>Seamless Area</i> pada halte/stasiun integrasi		
10	Transformasi Digital Pemasaran UKM	- Pendaftaran Jakpreneur dengan menggunakan QRIS - Fasilitasi UKM dengan pemasaran digital - Fasilitasi Penggunaan QRIS pada bazar/pameran	- 50.000 Pendaftar Program Jakpreneur - 1000 UKM terdaftar - 1000 Bazar/Pameran	2023-2025	- Dinas PPKUM - Bank DKI



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN